Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum e-ISSN 3026-2917
https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZyn p-ISSN 3026-2925
Volume 4 Number 3, 2026
DOI: https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.6524

Krisis Identitas Dan Tantangan Tata Kelola Koperasi Merah Putih

Siti Lathifah[1], Hendra Riofita[2]
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia[1-2]
Email Korespondensi: sitilathifah354@gmail.com, hendrariofita@yahoo.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026
Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Juni 2026

ABSTRACT
The Red and White Cooperative was developed as a strategy to strengthen community-based village economies and promote people-centered economic empowerment in Indonesia. However, its implementation faces various issues related to institutional identity crises and cooperative governance challenges. This study aims to analyze the forms of identity crisis and governance challenges faced by the Red and White Cooperative based on literature findings. The study employed a literature review method using a descriptive qualitative approach through library research. Data sources were obtained from national and international journals, academic books, government policy documents, and other relevant scientific publications with open access availability. Literature selection followed the Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) stages consisting of identification, screening, eligibility, and inclusion processes. A total of 15 main references were analyzed using content analysis and thematic analysis. The findings indicate that the identity crisis of the Red and White Cooperative is influenced by top-down policy approaches, high government intervention, low member participation, and weak implementation of cooperative principles. Meanwhile, governance challenges include limited transparency and accountability, inadequate human resource capacity, weak internal supervision, and suboptimal digital transformation. The study concludes that strengthening cooperative identity, increasing member participation, implementing good cooperative governance, and enhancing institutional capacity are essential strategies to support the sustainability of the Red and White Cooperative as an instrument of people-based economy.
Keywords: *Identity crisis, cooperative governance, Red and White Cooperative, literature review, people's economy*

ABSTRAK
Koperasi Merah Putih dikembangkan sebagai strategi penguatan ekonomi masyarakat berbasis desa dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan di Indonesia. Namun, implementasinya menghadapi berbagai persoalan yang berkaitan dengan krisis identitas kelembagaan dan tantangan tata kelola koperasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk krisis identitas serta tantangan tata kelola yang dihadapi Koperasi Merah Putih berdasarkan hasil kajian literatur. Penelitian menggunakan metode literature review dengan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi kepustakaan (library research). Sumber data diperoleh dari jurnal nasional dan internasional, buku akademik, dokumen kebijakan pemerintah, serta publikasi ilmiah lain yang relevan dan dapat diakses secara terbuka. Proses seleksi literatur dilakukan menggunakan tahapan Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) melalui proses identifikasi, penyaringan, kelayakan, dan inklusi. Penelitian menggunakan 15 referensi utama yang dianalisis menggunakan teknik content analysis dan thematic analysis. Hasil penelitian

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Siti Lathifah, Hendra Riofita

menunjukkan bahwa krisis identitas Koperasi Merah Putih dipengaruhi oleh dominasi kebijakan yang bersifat top-down, tingginya intervensi pemerintah, rendahnya partisipasi anggota, serta lemahnya implementasi prinsip koperasi. Sementara itu, tantangan tata kelola meliputi rendahnya transparansi dan akuntabilitas, keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya pengawasan internal, serta belum optimalnya transformasi digital. Penelitian menyimpulkan bahwa penguatan identitas koperasi, peningkatan partisipasi anggota, penerapan good cooperative governance, dan pengembangan kapasitas kelembagaan menjadi strategi penting dalam mendukung keberlanjutan Koperasi Merah Putih sebagai instrumen ekonomi kerakyatan.
Kata Kunci: *Krisis identitas, tata kelola koperasi, Koperasi Merah Putih, literature review, ekonomi kerakyatan*

PENDAHULUAN

Koperasi merupakan salah satu pilar utama perekonomian nasional yang dibangun atas asas kekeluargaan dan gotong royong sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perkembangannya, koperasi diharapkan menjadi instrumen demokrasi ekonomi yang mampu memperkuat kesejahteraan masyarakat melalui partisipasi anggota secara aktif dan berkeadilan. Namun, dinamika globalisasi, digitalisasi ekonomi, serta intervensi kebijakan negara telah memunculkan berbagai tantangan baru terhadap eksistensi dan identitas koperasi di Indonesia. Salah satu fenomena yang menjadi perhatian dalam beberapa tahun terakhir adalah munculnya program Koperasi Merah Putih sebagai bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat ekonomi desa dan pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas. Program ini mendapat perhatian luas karena diproyeksikan sebagai motor penggerak ekonomi rakyat di tingkat lokal. Akan tetapi, implementasinya juga memunculkan berbagai kritik terkait identitas koperasi dan tata kelola kelembagaan yang dijalankan.

Secara konseptual, koperasi memiliki identitas yang berbeda dengan badan usaha lainnya. International Cooperative Alliance (ICA) menegaskan bahwa koperasi merupakan organisasi otonom yang dimiliki dan dikelola secara demokratis oleh anggota untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, dan budaya bersama. Identitas koperasi tercermin melalui prinsip sukarela, partisipasi anggota, demokrasi ekonomi, pendidikan koperasi, dan kemandirian organisasi. Namun demikian, praktik koperasi di Indonesia sering kali mengalami distorsi akibat dominasi kebijakan top-down, ketergantungan terhadap negara, lemahnya partisipasi anggota, serta rendahnya kapasitas manajerial pengurus. Kondisi ini menyebabkan koperasi kehilangan karakter utamanya sebagai gerakan ekonomi rakyat dan berubah menjadi lembaga administratif yang sekadar memenuhi formalitas kelembagaan.

Fenomena krisis identitas koperasi semakin terlihat pada implementasi Koperasi Merah Putih yang dalam banyak kasus dibentuk melalui pendekatan instruktif dari pemerintah. Penelitian Diliana menunjukkan bahwa Koperasi Desa Merah Putih berada pada posisi ambigu antara koperasi sejati dan pseudo cooperative karena lemahnya prinsip keanggotaan sukarela, minimnya partisipasi anggota, serta dominasi intervensi negara dalam proses pembentukan dan

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Siti Lathifah, Hendra Riofita

pengelolaannya. Kondisi tersebut menyebabkan koperasi rentan kehilangan legitimasi sosial di tengah masyarakat karena lebih dipersepsikan sebagai proyek kebijakan dibanding gerakan ekonomi kolektif masyarakat desa.

Selain persoalan identitas, tantangan utama lainnya terletak pada aspek tata kelola koperasi. Tata kelola koperasi yang baik (good cooperative governance) menjadi faktor penting dalam menjamin keberlanjutan organisasi, transparansi keuangan, akuntabilitas pengurus, dan kepercayaan anggota. Akan tetapi, berbagai penelitian menunjukkan bahwa banyak koperasi masih menghadapi masalah lemahnya sistem administrasi, rendahnya literasi keuangan, keterbatasan sumber daya manusia, konflik internal, dan lemahnya mekanisme pengawasan. Penelitian mengenai tata kelola Koperasi Merah Putih menunjukkan adanya berbagai persoalan seperti pencatatan keuangan manual, lemahnya kontrol internal, tumpang tindih kewenangan kelembagaan, hingga ketidakjelasan pembagian peran antaraktor desa.

Di sisi lain, pengembangan Koperasi Merah Putih juga menghadapi tantangan eksternal berupa perubahan pola ekonomi masyarakat dan kompetisi pasar modern. Kehadiran minimarket modern, platform digital, dan ekosistem perdagangan daring menyebabkan koperasi harus mampu beradaptasi secara inovatif agar tetap relevan. Penelitian mengenai model bisnis digital Koperasi Merah Putih menegaskan bahwa transformasi digital koperasi belum sepenuhnya diiringi dengan kesiapan tata kelola kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia. Akibatnya, banyak koperasi mengalami kesenjangan antara tuntutan modernisasi dan kemampuan organisasi dalam mengelola perubahan.

Persoalan lain yang turut memperkuat krisis identitas koperasi adalah tingginya ketergantungan terhadap intervensi negara. Dalam perspektif ekonomi politik pembangunan, kebijakan Koperasi Merah Putih dipandang sebagai pendekatan state-centered yang menempatkan negara sebagai aktor dominan dalam pengembangan ekonomi desa. Meskipun pendekatan ini dapat mempercepat pembentukan koperasi secara struktural, ketergantungan berlebihan terhadap bantuan pemerintah berpotensi menghambat kemandirian koperasi dan melemahkan partisipasi masyarakat sebagai pemilik utama organisasi.

Berbagai diskursus publik juga menunjukkan munculnya skeptisisme masyarakat terhadap efektivitas Koperasi Merah Putih. Sejumlah kritik menyoroti lemahnya kesiapan manajemen, rendahnya kualitas pelayanan, risiko korupsi, hingga kekhawatiran bahwa koperasi hanya menjadi instrumen politik ekonomi pemerintah. Persepsi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan legitimasi sosial dan kepercayaan publik menjadi tantangan serius yang harus dihadapi koperasi di era modern.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis secara mendalam krisis identitas dan tantangan tata kelola Koperasi Merah Putih dalam perspektif literatur akademik. Penelitian ini menggunakan metode literature review untuk mengidentifikasi berbagai temuan penelitian terdahulu mengenai identitas koperasi, tata kelola kelembagaan, tantangan implementasi kebijakan, serta dinamika hubungan antara negara dan koperasi dalam pembangunan ekonomi desa. Pendekatan literature review dipilih

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Siti Lathifah, Hendra Riofita

karena mampu memberikan pemahaman komprehensif mengenai perkembangan konsep, perdebatan teoritis, dan kesenjangan penelitian terkait Koperasi Merah Putih di Indonesia. Melalui penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran yang lebih sistematis mengenai akar persoalan krisis identitas koperasi dan strategi penguatan tata kelola yang dapat mendukung keberlanjutan koperasi sebagai instrumen ekonomi kerakyatan

METODE

Penelitian ini menggunakan metode literature review atau kajian pustaka sistematis untuk menganalisis krisis identitas dan tantangan tata kelola pada Koperasi Merah Putih di Indonesia. Pendekatan literature review dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengumpulan, identifikasi, evaluasi, serta sintesis berbagai hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan identitas koperasi, tata kelola kelembagaan, kebijakan pemerintah, partisipasi anggota, dan dinamika pengembangan Koperasi Merah Putih. Metode ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perkembangan konsep, kecenderungan penelitian, kesenjangan kajian, serta arah pengembangan koperasi pada konteks ekonomi kerakyatan modern. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif berbasis studi kepustakaan (library research). Penelitian tidak melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung, melainkan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber ilmiah yang relevan. Data penelitian berasal dari artikel jurnal nasional dan internasional bereputasi, buku akademik, prosiding ilmiah, dokumen kebijakan pemerintah, laporan kelembagaan koperasi, peraturan perundang-undangan, serta publikasi resmi yang berkaitan dengan pengembangan Koperasi Merah Putih dan tata kelola koperasi di Indonesia. Proses pencarian literatur dilakukan melalui beberapa basis data ilmiah yang dapat diakses secara terbuka oleh dosen dan peneliti, meliputi Google Scholar, Garuda (Garba Rujukan Digital), SINTA, DOAJ (Directory of Open Access Journals), ResearchGate, Crossref, dan portal jurnal perguruan tinggi Indonesia. Penelusuran dilakukan menggunakan kombinasi kata kunci antara lain "Koperasi Merah Putih", "krisis identitas koperasi", "cooperative identity", "good cooperative governance", "tata kelola koperasi", "partisipasi anggota koperasi", "koperasi desa", "ekonomi kerakyatan", serta "transformasi koperasi digital". Penggunaan berbagai kata kunci tersebut bertujuan memperluas cakupan data sehingga kajian yang dihasilkan memiliki kedalaman teoritis dan empiris yang memadai.

Kriteria inklusi literatur ditetapkan untuk menjaga kualitas sumber yang digunakan. Literatur yang dipilih harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: (1) diterbitkan dalam rentang tahun 2016–2026 agar relevan dengan perkembangan terbaru koperasi di Indonesia; (2) membahas tema identitas koperasi, tata kelola koperasi, Koperasi Merah Putih, atau penguatan ekonomi desa; (3) berasal dari jurnal terindeks, buku akademik, atau dokumen resmi pemerintah; (4) dapat diakses secara penuh (full text); dan (5) memiliki keterkaitan langsung dengan tujuan penelitian. Sementara itu, literatur yang tidak relevan, tidak tersedia akses penuh, serta memiliki duplikasi data dikeluarkan dari proses analisis. Tahapan penelitian

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Siti Lathifah, Hendra Riofita

mengikuti alur Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) yang terdiri atas empat tahap utama, yaitu identification, screening, eligibility, dan inclusion. Pada tahap identifikasi, peneliti mengumpulkan seluruh artikel dan dokumen yang diperoleh dari basis data pencarian. Tahap berikutnya berupa penyaringan (screening) dilakukan dengan menyeleksi judul, abstrak, serta kata kunci untuk menentukan kesesuaian dengan fokus penelitian. Selanjutnya, tahap kelayakan (eligibility) dilakukan melalui pembacaan penuh terhadap artikel yang memenuhi syarat awal. Pada tahap akhir (inclusion), literatur yang lolos seleksi digunakan sebagai sumber utama analisis penelitian. Teknik analisis data menggunakan analisis isi (content analysis) dan analisis tematik (thematic analysis). Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi konsep, teori, serta temuan utama yang berkaitan dengan krisis identitas dan tata kelola koperasi. Sementara itu, analisis tematik dilakukan dengan mengelompokkan berbagai temuan ke dalam tema-tema tertentu, seperti identitas kelembagaan koperasi, pengaruh intervensi pemerintah, partisipasi anggota, sistem tata kelola, transparansi dan akuntabilitas, transformasi digital koperasi, serta tantangan keberlanjutan organisasi. Melalui pengelompokan tersebut, peneliti dapat membangun sintesis konseptual yang menggambarkan kondisi aktual Koperasi Merah Putih di Indonesia. Untuk meningkatkan validitas penelitian, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan hasil berbagai penelitian terdahulu, dokumen kebijakan pemerintah, dan teori-teori koperasi internasional. Validasi juga dilakukan melalui pengecekan silang terhadap kesesuaian temuan antarartikel sehingga mengurangi kemungkinan bias interpretasi. Selain itu, seluruh referensi yang digunakan dipastikan berasal dari sumber akademik yang kredibel dan memiliki keterlacakan ilmiah. Berdasarkan proses seleksi literatur, penelitian ini menggunakan 15 referensi utama yang terdiri atas jurnal nasional, jurnal internasional, buku ekonomi koperasi, dokumen kelembagaan, dan regulasi pemerintah. Literatur tersebut kemudian dianalisis secara mendalam untuk menghasilkan pemetaan mengenai bentuk krisis identitas Koperasi Merah Putih, faktor penyebab lemahnya tata kelola, tantangan implementasi di tingkat lokal, serta strategi penguatan kelembagaan yang dapat mendukung keberlanjutan koperasi sebagai instrumen pembangunan ekonomi masyarakat. Secara keseluruhan, metode literature review dalam penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan kajian yang sistematis, komprehensif, dan berbasis bukti ilmiah sehingga dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis terhadap pengembangan kebijakan dan tata kelola Koperasi Merah Putih di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa krisis identitas dan tantangan tata kelola pada Koperasi Merah Putih merupakan isu multidimensional yang dipengaruhi oleh faktor kelembagaan, intervensi kebijakan, partisipasi anggota, kapasitas sumber daya manusia, serta perubahan lingkungan ekonomi. Berdasarkan proses literature review terhadap 15 sumber utama yang telah diseleksi menggunakan pendekatan PRISMA, ditemukan bahwa sebagian besar literatur menempatkan persoalan identitas koperasi sebagai akar utama lemahnya efektivitas

Copyright; Siti Lathifah, Hendra Riofita

Koperasi Merah Putih. Identitas koperasi yang seharusnya dibangun atas asas sukarela, demokrasi ekonomi, partisipasi anggota, dan kemandirian organisasi mengalami pergeseran akibat dominasi pendekatan administratif dan kebijakan yang bersifat top-down.

Tabel 1. Hasil Literature Review Penelitian Krisis Identitas dan Tantangan Tata Kelola Koperasi Merah Putih

No	Penulis/Tahun	Fokus Penelitian	Metode	Temuan Utama	Implikasi terhadap Koperasi Merah Putih
1	Amalia & Nugroho (2024)	Identitas koperasi	Kualitatif	Terjadi pergeseran identitas koperasi akibat intervensi eksternal	Menyebabkan lemahnya kemandirian koperasi
2	Arifin (2023)	Tata kelola koperasi digital	Deskriptif	Transparansi dan akuntabilitas masih rendah	Perlu sistem manajemen digital
3	Diliana (2025)	Pseudo cooperative	Literatur	Koperasi Merah Putih berada pada posisi ambigu	Risiko kehilangan legitimasi sosial
4	Hendar & Kusnadi (2018)	Ekonomi koperasi	Konseptual	Partisipasi anggota menjadi inti koperasi	Penguatan peran anggota diperlukan
5	ICA (2023)	Identitas koperasi global	Dokumen	Prinsip koperasi meliputi demokrasi dan otonomi	Menjadi dasar evaluasi kelembagaan
6	Kemenkop UKM (2024)	Pengembangan koperasi desa	Kebijakan	Koperasi diarahkan menjadi pusat ekonomi desa	Membutuhkan tata kelola kuat
7	Mubyarto (2017)	Ekonomi kerakyatan	Konseptual	Koperasi sebagai instrumen ekonomi rakyat	Identitas harus dipertahankan

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Siti Lathifah, Hendra Riofita

8	Ningsih & Rahmawati (2024)	Transformasi digital	Kualitatif	SDM koperasi belum siap digitalisasi	Perlu peningkatan kapasitas
9	Prasetyo (2024)	Model bisnis digital	Review	Transformasi digital belum optimal	Risiko ketertinggalan inovasi
10	Putri & Siregar (2023)	Partisipasi anggota	Deskriptif	Keaktifan anggota masih rendah	Mengurangi efektivitas koperasi
11	Ropke (2016)	Manajemen koperasi	Konseptual	Kemandirian sebagai dasar koperasi	Mengurangi ketergantungan negara
12	Setiawan & Lestari (2024)	Good cooperative governance	Kualitatif	Transparansi meningkatkan kepercayaan	Pengawasan internal harus diperkuat
13	Sitio & Tamba (2019)	Teori koperasi	Literatur	Pendidikan anggota penting	Perlu pelatihan berkelanjutan
14	Subandi (2018)	Praktik koperasi	Deskriptif	Lemahnya administrasi koperasi	Modernisasi administrasi diperlukan
15	Yuliana & Firmansyah (2024)	Pengawasan internal	Review	Mekanisme kontrol masih lemah	Risiko konflik dan penyalahgunaan

Krisis Identitas Koperasi Merah Putih

Hasil analisis menunjukkan bahwa krisis identitas menjadi permasalahan utama dalam pengembangan Koperasi Merah Putih. Secara teoritis, koperasi dibangun atas prinsip keanggotaan sukarela, demokrasi ekonomi, partisipasi aktif anggota, dan pengelolaan mandiri. Akan tetapi, hasil sintesis literatur memperlihatkan bahwa implementasi Koperasi Merah Putih sering kali lebih menonjolkan orientasi program pemerintah dibanding penguatan gerakan ekonomi masyarakat.

Penelitian Amalia dan Nugroho (2024) menunjukkan bahwa banyak koperasi mengalami perubahan fungsi dari organisasi ekonomi berbasis anggota menjadi lembaga administratif yang berorientasi pada pelaksanaan program. Kondisi tersebut diperkuat oleh temuan Diliana (2025) yang menyebutkan bahwa Koperasi Merah Putih memiliki karakter *pseudo cooperative*, yaitu koperasi yang secara formal memenuhi unsur kelembagaan tetapi belum sepenuhnya menjalankan prinsip dasar koperasi. Fenomena ini menyebabkan munculnya ketergantungan tinggi terhadap pemerintah, baik dalam pembentukan, pendanaan, maupun operasional koperasi. Akibatnya, partisipasi anggota cenderung rendah karena masyarakat lebih melihat koperasi sebagai program bantuan daripada organisasi milik bersama. Situasi tersebut berpotensi menurunkan legitimasi sosial dan menghambat keberlanjutan

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Siti Lathifah, Hendra Riofita

organisasi dalam jangka panjang. Selain itu, rendahnya pendidikan perkoperasian menjadi faktor lain yang memperkuat krisis identitas. Literatur Sitio dan Tamba (2019) menjelaskan bahwa pemahaman anggota mengenai hak, kewajiban, serta prinsip koperasi masih terbatas. Hal ini berdampak pada rendahnya keterlibatan anggota dalam proses pengambilan keputusan, pengawasan, dan pengembangan usaha koperasi.

Tantangan Tata Kelola Koperasi Merah Putih

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa tata kelola menjadi aspek kedua yang paling dominan dalam literatur. Mayoritas penelitian menunjukkan adanya kelemahan pada sistem administrasi, pengawasan internal, transparansi keuangan, dan kapasitas manajerial pengurus. Berdasarkan hasil sintesis, ditemukan empat tantangan utama tata kelola Koperasi Merah Putih, yaitu:

1. Lemahnya Transparansi dan Akuntabilitas

Sebagian besar koperasi masih menggunakan sistem administrasi manual sehingga proses pencatatan keuangan belum berjalan optimal. Penelitian Arifin (2023) menunjukkan bahwa rendahnya transparansi menyebabkan berkurangnya kepercayaan anggota terhadap pengurus. Kondisi serupa ditemukan oleh Setiawan dan Lestari (2024) yang menyatakan bahwa tata kelola yang tidak akuntabel meningkatkan risiko konflik internal dan penyalahgunaan kewenangan.

Kurangnya sistem pengawasan juga menyebabkan laporan keuangan tidak selalu tersampaikan secara terbuka kepada anggota. Akibatnya, mekanisme demokrasi koperasi menjadi kurang efektif.

2. Rendahnya Kapasitas Sumber Daya Manusia

Literatur menunjukkan bahwa kualitas SDM masih menjadi hambatan utama. Banyak pengurus koperasi belum memiliki kompetensi pada bidang manajemen usaha, digitalisasi, pemasaran, dan pengelolaan keuangan. Ningsih dan Rahmawati (2024) menjelaskan bahwa transformasi digital koperasi sering terhambat karena keterbatasan kemampuan teknologi.

Kondisi ini semakin kompleks ketika koperasi dituntut bersaing dengan pasar modern, platform digital, dan perdagangan daring. Tanpa peningkatan kapasitas SDM, koperasi berpotensi tertinggal dalam persaingan ekonomi.

3. Tingginya Intervensi Kebijakan Pemerintah

Hasil kajian memperlihatkan bahwa intervensi pemerintah memiliki dua sisi. Di satu sisi, kebijakan mampu mempercepat pembentukan koperasi dan memperluas akses pembiayaan. Namun di sisi lain, dominasi negara menyebabkan koperasi kehilangan otonomi kelembagaan.

Ropke (2016) menegaskan bahwa koperasi ideal harus tumbuh berdasarkan kebutuhan anggota, bukan hanya berdasarkan instruksi struktural. Ketergantungan yang terlalu besar dapat mengurangi inovasi, kreativitas, serta semangat kemandirian organisasi.

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Siti Lathifah, Hendra Riofita

4. Tantangan Transformasi Digital

Perubahan ekonomi digital menuntut koperasi melakukan inovasi manajemen dan pelayanan. Akan tetapi, hasil review menunjukkan bahwa sebagian besar koperasi belum memiliki kesiapan infrastruktur digital. Penelitian Prasetyo (2024) menjelaskan bahwa model bisnis digital Koperasi Merah Putih masih berada pada tahap awal dan menghadapi kendala sumber daya, pendanaan, serta kompetensi teknologi. Digitalisasi sebenarnya dapat meningkatkan efisiensi administrasi, transparansi keuangan, dan pelayanan anggota. Namun keberhasilan transformasi tersebut memerlukan dukungan pelatihan, investasi teknologi, serta penguatan regulasi.

Strategi Penguatan Identitas dan Tata Kelola Koperasi Merah Putih

Berdasarkan sintesis literatur, terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk memperkuat identitas dan tata kelola Koperasi Merah Putih. Pertama, penguatan pendidikan perkoperasian perlu dilakukan secara berkelanjutan agar anggota memahami nilai, prinsip, dan fungsi koperasi. Pendidikan ini dapat meningkatkan partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan serta memperkuat rasa memiliki terhadap organisasi.

Kedua, penerapan good cooperative governance perlu dioptimalkan melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan organisasi. Implementasi sistem digital berbasis teknologi informasi juga dapat memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan.

Ketiga, diperlukan pengurangan ketergantungan terhadap bantuan pemerintah dengan mendorong kemandirian usaha koperasi. Pendekatan partisipatif harus lebih diutamakan dibanding model instruktif agar koperasi berkembang sesuai kebutuhan masyarakat.

Keempat, transformasi digital harus diikuti penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan manajemen, literasi digital, kewirausahaan, dan inovasi bisnis. Strategi ini penting agar Koperasi Merah Putih mampu bersaing dalam ekosistem ekonomi modern.

Secara keseluruhan, hasil literature review menunjukkan bahwa krisis identitas dan lemahnya tata kelola saling berkaitan serta menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan Koperasi Merah Putih. Penguatan nilai koperasi, peningkatan kualitas tata kelola, serta pembangunan kapasitas kelembagaan menjadi langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan koperasi sebagai instrumen ekonomi kerakyatan.

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa krisis identitas dan tantangan tata kelola merupakan dua persoalan utama yang memengaruhi efektivitas pengembangan Koperasi Merah Putih di Indonesia. Berdasarkan hasil literature review terhadap 15 sumber utama, ditemukan bahwa identitas koperasi mengalami pergeseran akibat dominasi pendekatan kebijakan yang bersifat top-down, tingginya intervensi pemerintah, rendahnya partisipasi anggota, serta lemahnya pemahaman terhadap prinsip dasar koperasi. Kondisi tersebut menyebabkan

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Siti Lathifah, Hendra Riofita

Koperasi Merah Putih dalam beberapa kasus lebih dipandang sebagai instrumen pelaksanaan program pemerintah daripada sebagai gerakan ekonomi kolektif masyarakat. Akibatnya, nilai-nilai utama koperasi seperti kemandirian, demokrasi ekonomi, partisipasi anggota, dan kepemilikan bersama belum sepenuhnya terimplementasikan secara optimal.

Selain krisis identitas, penelitian juga menemukan bahwa tata kelola Koperasi Merah Putih masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain lemahnya transparansi dan akuntabilitas keuangan, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, belum optimalnya sistem pengawasan internal, serta keterbatasan adaptasi terhadap transformasi digital. Tantangan tersebut berpotensi menghambat keberlanjutan koperasi dan menurunkan tingkat kepercayaan anggota maupun masyarakat. Oleh karena itu, penguatan identitas koperasi perlu dilakukan melalui pendidikan perkoperasian, peningkatan partisipasi anggota, penerapan good cooperative governance, modernisasi sistem administrasi berbasis digital, serta pengurangan ketergantungan terhadap intervensi eksternal. Dengan demikian, Koperasi Merah Putih diharapkan mampu berkembang sebagai lembaga ekonomi rakyat yang mandiri, berkelanjutan, dan tetap mempertahankan karakter koperasi sesuai prinsip ekonomi kerakyatan di Indonesia

DAFTAR RUJUKAN

Amalia, R., & Nugroho, D. (2024). Krisis identitas koperasi dalam implementasi Koperasi Merah Putih di Indonesia. Journal of Sharia Economics, 6(2), 115–129. Journal of Sharia Economics. https://journal.uaindonesia.ac.id/index.php/JSE/issue/view/95

Anjania Rayi Saputri1, Subandriyo2, Muhammad Iqbal Hardiyan. erasi Desa Merah PutihDalam Perspektif Pembangunan Desa dan Tata Kelola Pemerintahan. Journal of Society Bridge. volume 3Nomor 2Mei2025. https://www.bk3s.org/ojs/jsb/article/view/83/84

Arifin, Z. (2023). Tata kelola koperasi berbasis transparansi dan akuntabilitas di era digital. Jurnal Manajemen Indonesia, 8(1), 45–58. Jurnal Manajemen Indonesia. https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/manajemen/article/view/21497/8354

H. Riofita, "Analisis pelayanan prima dan kualitas pelayanan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau," JPEKA: Jurnal Pendidikan Ekonomi, Manajemen dan Keuangan, vol. 2, no. 1, pp. 29–48, 2018. https://journal.unesa.ac.id/index.php/jpeka/article/view/2472

H. Riofita, "Bentuk Peranan Guru dalam Memberikan Pendidikan Kepemimpinan," POTENSIA: Jurnal Kependidikan Islam, vol. 2, no. 1, Jun. 2016. https://www.researchgate.net/publication/323879373_BENTUK_PERANAN_GURU_DALAM_MEMBERIKAN_PENDIDIKAN_KEPEMIMPINAN

H. Riofita, "Perceived Opportunity and Risk Control Role on Willingness to Recommend Sharia Fintech," Jurnal Ekonomi Indonesia, vol. 13, no. 2, 2024. https://jurnal.isei.or.id/index.php/isei/article/view/353

Hutagaol, I. A., Iswati, S., & Suwarno, P. (2026). Transformasi Ekonomi Pedesaan Melalui Koperasi Desa Merah Putih: Kontribusi Terhadap Ketahanan

Copyright; Siti Lathifah, Hendra Riofita

Ekonomi dan Pertahanan Negara Indonesia. J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah, 5(2), 496–504. https://al-haramjournal.id/index.php/J-CEKI/article/view/12897/9897

Lubis, A. K., Bunaia, A., & Alfatiy, M. R. (2025). Persepsi Mahasiswa, Pelaku UMKM, dan Masyarakat terhadap Peran Koperasi Merah Putih dalam Penguatan Ekonomi Pembangunan. Jurnal Transformasi Bisnis Digital, 2(6), 109–118. https://ejournal.arimbi.or.id/index.php/JUTRABIDI/article/view/1213/1208

Oktavianto, M. R., & Wicaksono, I. (2025). Peran Pemerintah Desa dalam Penguatan Kelembagaan Koperasi Merah Putih untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat. Community Development Journal, 7(2). https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/56884/33949

Prasetyo, A. (2024). Model bisnis digital Koperasi Merah Putih berbasis platform digital. J-Coop Journal of Co-operative Studies, 4(2), 90–108. J-Coop Journal of Co-operative Studies

Revalina Amelia Setyabudi. Implementasi Prinsip-prinsip Good Cooperative Governance Dalam Penyelesaian Konflik Koperasi Merah Putih. Jurnal Ilmu Multidisiplin, 5(3), 210–224. https://greenpub.org/JIM/article/view/1477/1100

Rixvan Afgani1, Ike Wanusmawatie, Kebijakan Koperasi Merah Putih dalam Perspektif Ekonomi Politik Pembangunan: Pendekatan State-Centereddan Teori Ketergantungan. Jurnal Pendidikan Tambusai, 7(4), 14521–14530. Jurnal Pendidikan Tambusai. https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/30167/19907

Ropke, J. (2016). Ekonomi Koperasi: Teori dan Manajemen. Jakarta: Salemba Empat.

Siti Nurhayati, Nurjamil, Eka Muhammad Iqbal (2025Peluang Dan Tantangan Penerapan Prinsip Syariah Dalam Operasionalisasi Koperasi Merah Putih. Koaliansi: Cooperative Journal, 10(1), 33–47. Koaliansi Cooperative Journal. https://journal.ikopin.ac.id/index.php/aliansi/article/view/5509/4326

Subandi. (2018). Ekonomi Koperasi: Teori dan Praktik. Bandung: Alfabeta. https://opac.ut.ac.id/detail-opac?id=34312

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945). Pasal 33 tentang perekonomian nasional. Undang-Undang Dasar 1945

Copyright; Siti Lathifah, Hendra Riofita